

## Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Halmahera Selatan

Fitriah\*<sup>1</sup>, Amran Husen<sup>2</sup>, Nahu Daud<sup>3</sup>, Dewi Permatasari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Prodi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun, Indonesia

E-mail: [fitriahhalsel@gmail.com](mailto:fitriahhalsel@gmail.com)<sup>1</sup>, [dewi.permatasari@unkhair.ac.id](mailto:dewi.permatasari@unkhair.ac.id)<sup>4</sup>

### Article History:

Received: 24 Juli 2026

Revised: 11 Agustus 2026

Accepted: 04 September 2026

**Keywords:** Economic Growth; Fiscal Transfer; Natural Resource Revenue Sharing; Poverty; Tax Revenue Sharing

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan periode 2010–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) dengan bantuan program IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH SDA dan DBH Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DBH SDA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan DBH Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak mampu memediasi pengaruh DBH SDA maupun DBH Pajak terhadap tingkat kemiskinan karena kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas Dana Bagi Hasil dalam menurunkan kemiskinan lebih ditentukan oleh kualitas pengelolaan dan alokasi anggaran daripada besarnya dana yang diterima pemerintah daerah.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi masalah utama pembangunan karena mencerminkan keterbatasan pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan akses pelayanan dasar. Rumah tangga miskin juga menghadapi risiko yang lebih besar ketika harga pangan naik, pekerjaan hilang, hasil produksi menurun, atau bencana mengganggu kehidupan. Pemerintah daerah perlu menangani persoalan tersebut melalui kebijakan yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. World Bank (2024)

menekankan bahwa pengurangan kemiskinan membutuhkan pertumbuhan yang tangguh sekaligus perlindungan terhadap risiko. UNDP (2024) menambahkan bahwa kualitas institusi menentukan kemampuan pemerintah mengubah sumber daya menjadi kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi menyediakan ruang bagi kenaikan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, perluasan basis pajak, dan pembiayaan pelayanan publik. Namun, pertumbuhan tidak selalu mengurangi kemiskinan. Manfaatnya dapat terkonsentrasi pada sektor padat modal, perusahaan besar, tenaga kerja terampil, atau wilayah tertentu. Konsep pertumbuhan pro-miskin menuntut ekspansi ekonomi yang menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan kelompok bawah, serta memperluas akses terhadap aset produktif. Salsabil dan Riani (2023) menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan dan kemiskinan perlu dibaca bersama pendidikan, kesehatan, dan dinamika penduduk. Tope et al. (2025) juga menegaskan peran distribusi dan pasar kerja dalam menentukan hasil sosial pertumbuhan.

Desentralisasi fiskal memberi pemerintah daerah kewenangan mengelola pendapatan dan belanja sesuai kebutuhan lokal. Pemerintah pusat tetap menyalurkan transfer karena kapasitas fiskal dan kebutuhan pelayanan berbeda antardaerah. Dana Bagi Hasil atau DBH menjadi salah satu instrumen utama. DBH mengembalikan sebagian penerimaan negara kepada daerah menurut sumber penerimaan dan formula yang ditetapkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 mengarahkan transfer untuk memperkuat pelayanan, pemerataan, dan kualitas belanja. Karena itu, evaluasi DBH tidak cukup menilai jumlah yang diterima. Evaluasi juga perlu menilai hasil ekonomi dan sosial yang terbentuk.

DBH Sumber Daya Alam berasal dari penerimaan atas pemanfaatan kehutanan, mineral dan batubara, minyak dan gas, panas bumi, serta perikanan. Daerah penghasil menerima bagian karena aktivitas ekstraktif menimbulkan kebutuhan infrastruktur, perlindungan lingkungan, pelayanan sosial, dan diversifikasi ekonomi. Penerimaan tersebut dapat mengubah kekayaan alam menjadi aset manusia dan aset publik. Namun, risiko kutukan sumber daya muncul ketika pendapatan komoditas berfluktuasi, belanja tidak produktif, ketergantungan fiskal meningkat, dan manfaat ekonomi tidak tersebar. Hijrasil (2024) menunjukkan bahwa hubungan transfer sumber daya, investasi, pertumbuhan, dan kemiskinan di Maluku Utara bersifat kompleks.

DBH Pajak berasal dari penerimaan pajak pusat yang dibagikan kepada daerah sesuai ketentuan. Dana ini dapat memperluas ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan dukungan usaha. Dampaknya bergantung pada waktu penyaluran, kualitas perencanaan, komposisi belanja, dan kemampuan pelaksanaan. Liyana et al. (2022) menegaskan bahwa manfaat DBH Pajak ditentukan oleh alokasi dan kualitas layanan. Penerimaan yang tidak terhubung dengan kegiatan produktif dapat menghasilkan pengganda lokal yang rendah. Penerimaan yang terserap oleh program tanpa sasaran jelas juga dapat gagal menurunkan kemiskinan.

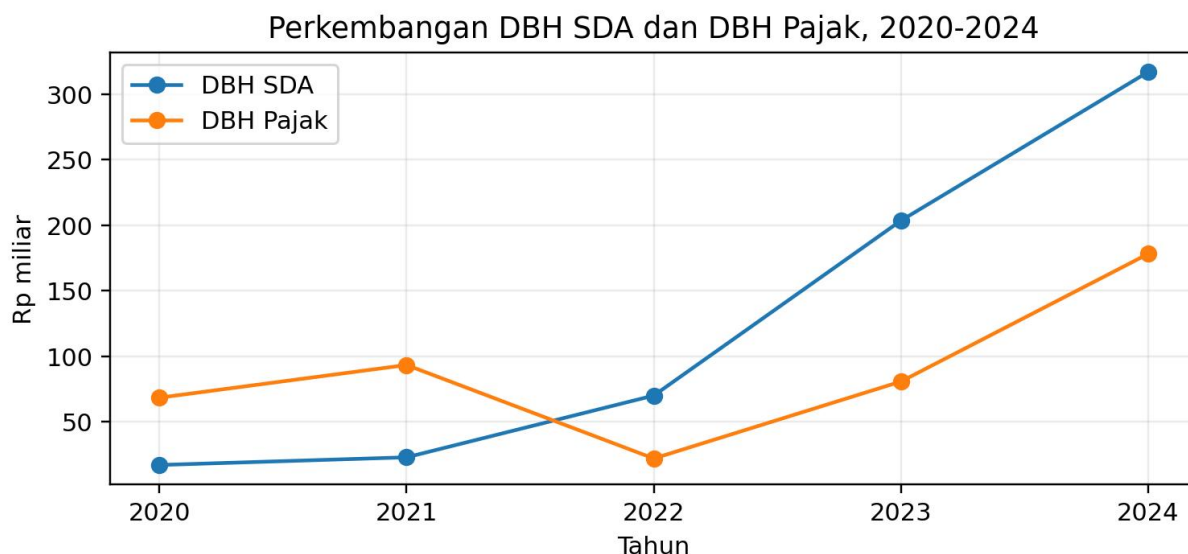
Kabupaten Halmahera Selatan memiliki karakter kepulauan dan basis ekonomi sumber daya alam. Jarak antarpulau meningkatkan biaya logistik, pembangunan fasilitas, pengawasan, serta distribusi tenaga pelayanan. Aktivitas pertambangan dan industri pengolahan dapat meningkatkan PDRB dengan cepat, tetapi sektor tersebut tidak selalu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Kondisi ini dapat membentuk paradoks. Output dan penerimaan daerah meningkat, sedangkan kemiskinan turun secara lambat atau berfluktuasi. Pertumbuhan agregat perlu diuji sebagai jalur penghubung antara penerimaan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Data awal 2020-2024 memperlihatkan perubahan yang tajam. DBH SDA meningkat dari Rp16,95 miliar menjadi Rp316,79 miliar. DBH Pajak berfluktuasi dari Rp68,29 miliar, turun hingga Rp21,89 miliar pada 2022, kemudian naik menjadi Rp178,00 miliar pada 2024.

Pertumbuhan ekonomi beralih dari kontraksi 2,07 persen pada 2020 menjadi 27,78 persen pada 2023 dan 23,95 persen pada 2024. Tingkat kemiskinan bergerak dalam rentang yang lebih sempit, yaitu 4,99 sampai 5,68 persen. Perbedaan skala perubahan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan dan output belum otomatis menghasilkan penurunan kemiskinan.

Penelitian terdahulu memberikan hasil yang beragam. AlQomariah et al. (2022) menemukan hubungan DBH dengan pertumbuhan ekonomi di Boyolali. Nany et al. (2022) menunjukkan bahwa DBH dan belanja daerah ikut menjelaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Gafur Mas'ud dan Rochaida (2022) menemukan bahwa determinan pertumbuhan tidak selalu sama dengan determinan kemiskinan. Hilmiyah dan Anggita (2025) juga menunjukkan bahwa transfer dapat berpengaruh terhadap kemiskinan ketika pertumbuhan dan belanja modal tidak menunjukkan pengaruh parsial yang kuat. Variasi tersebut menegaskan pentingnya konteks wilayah dan mekanisme transmisi.

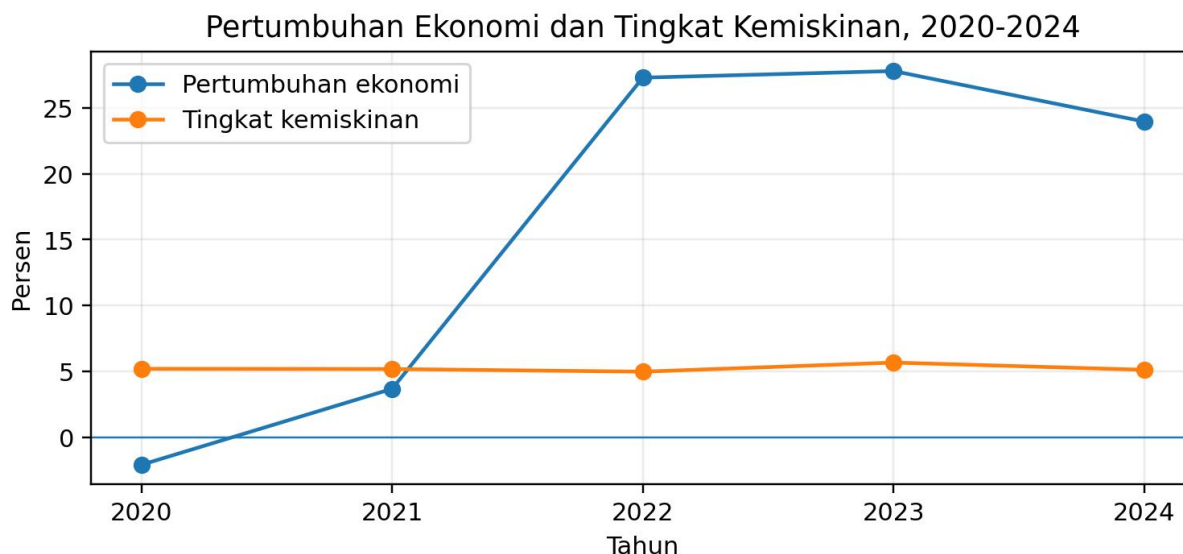
Kesenjangan penelitian terletak pada terbatasnya kajian yang memisahkan DBH SDA dan DBH Pajak, menguji pengaruh langsung terhadap kemiskinan, serta menilai jalur tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi pada satu kabupaten kepulauan. Penelitian ini menggunakan data tahunan 2016-2025 dan analisis jalur. Belanja modal dan belanja pegawai dipakai sebagai informasi penguat dalam pembahasan. Penelitian bertujuan menganalisis tujuh hubungan, yaitu dua jalur menuju pertumbuhan, dua pengaruh langsung DBH terhadap kemiskinan, pengaruh pertumbuhan terhadap kemiskinan, serta dua jalur mediasi.



**Gambar 1. Perkembangan DBH SDA dan DBH Pajak Kabupaten Halmahera Selatan, 2020-2024**

*Sumber: Data dalam tesis Fitriah, diolah, 2026.*

Gambar 1 menunjukkan bahwa DBH SDA mengalami kenaikan paling besar, sedangkan DBH Pajak bergerak sangat fluktuatif. Pola ini menciptakan tantangan perencanaan. Pemerintah daerah perlu menjaga kesinambungan program ketika penerimaan turun dan mencegah ekspansi kewajiban rutin saat penerimaan meningkat. Penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah menjadi penting agar kenaikan DBH dapat membentuk aset produktif dan layanan yang bertahan lebih lama daripada siklus komoditas.



**Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Halmahera Selatan, 2020-2024**

*Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Selatan, 2026.*

Gambar 2 memperlihatkan bahwa lonjakan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti penurunan kemiskinan yang konsisten. Kemiskinan turun hingga 2022, meningkat pada 2023, lalu kembali turun pada 2024. Fenomena tersebut menjadi alasan utama untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung. Analisis perlu membedakan pertumbuhan yang hanya meningkatkan output agregat dari pertumbuhan yang memperluas pekerjaan, pendapatan, dan akses pelayanan bagi rumah tangga miskin.

## **LANDASAN TEORI**

### **Desentralisasi Fiskal dan Dana Bagi Hasil**

Teori desentralisasi fiskal berangkat dari asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki informasi lebih dekat mengenai kebutuhan masyarakat. Kedekatan tersebut memungkinkan pemerintah memilih layanan, lokasi, dan kelompok sasaran secara lebih tepat. Keunggulan informasi tidak otomatis menghasilkan kinerja yang baik. Kapasitas aparatur, kualitas data, akuntabilitas, pengadaan, dan pengawasan menentukan manfaat transfer. Isman et al. (2025) menunjukkan bahwa akuntabilitas penerimaan dan transfer berhubungan dengan kemampuan pemerintah menghasilkan kesejahteraan masyarakat.

DBH SDA dan DBH Pajak memiliki karakter berbeda. DBH SDA terkait aktivitas ekstraktif dan lebih rentan terhadap harga serta volume komoditas. DBH Pajak terkait penerimaan pajak pusat dan dapat berfluktuasi akibat kinerja ekonomi maupun kebijakan penerimaan. Perbedaan sumber tersebut dapat menghasilkan dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan dan kemiskinan. Pemerintah perlu mengelola DBH SDA dengan prinsip keberlanjutan antargenerasi, sedangkan DBH Pajak memerlukan perencanaan yang mengantisipasi perubahan penerimaan dan menjaga kualitas pelayanan.

### **Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Inklusif**

Teori pertumbuhan endogen menempatkan modal manusia, infrastruktur, pengetahuan, dan institusi sebagai sumber pertumbuhan yang dapat dipengaruhi kebijakan. Transfer fiskal dapat membiayai jalan, pelabuhan, energi, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan layanan usaha.

Investasi tersebut meningkatkan produktivitas dan menarik kegiatan swasta. Pengaruhnya bergantung pada mutu proyek, pemeliharaan, keterhubungan dengan sektor lokal, serta kapasitas masyarakat memanfaatkan aset.

Teori pertumbuhan pro-miskin menilai pertumbuhan melalui perubahan pendapatan kelompok bawah. Pertumbuhan dapat menurunkan kemiskinan jika menciptakan pekerjaan produktif, meningkatkan upah, memperluas usaha mikro, dan mengurangi biaya pelayanan. Pertumbuhan ekstraktif yang padat modal dapat meningkatkan PDRB tanpa membentuk jalur tersebut. Silalahi dan Primacintya (2025) menekankan pentingnya investasi bagi pertumbuhan inklusif, sedangkan Mailyn dan Kartika (2025) menunjukkan bahwa determinan fiskal dan sosial ekonomi perlu dianalisis secara terpadu.

Kemiskinan dalam penelitian ini diukur melalui persentase penduduk miskin. Indikator tersebut menunjukkan proporsi penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Ukuran ini mudah dibandingkan antarwaktu, tetapi belum menggambarkan kedalaman dan keparahan kemiskinan. Karena itu, hasil regresi perlu dibaca bersama struktur pekerjaan, harga lokal, akses layanan, dan karakter spasial wilayah kepulauan. BPS (2024) menekankan bahwa indikator kemiskinan makro berfungsi untuk membaca tren agregat, bukan seluruh pengalaman rumah tangga.

### **Kutukan Sumber Daya dan Kualitas Belanja**

Teori kutukan sumber daya menjelaskan bahwa kekayaan alam dapat berjalan bersama diversifikasi yang lemah, volatilitas fiskal, ketimpangan, dan perebutan rente. Risiko tersebut meningkat ketika penerimaan membiayai pengeluaran berulang yang sulit dikurangi atau proyek dengan manfaat rendah. Risiko menurun ketika pemerintah mengubah penerimaan menjadi pendidikan, kesehatan, konektivitas, inovasi, dan sektor non-ekstraktif. Perspektif ini relevan bagi Halmahera Selatan karena kenaikan DBH SDA berlangsung bersama ekspansi ekonomi pertambangan.

Kualitas belanja menjadi saluran utama. Belanja modal membentuk aset fisik, sedangkan belanja pegawai menyediakan kapasitas operasional. Jalan tanpa pemeliharaan atau fasilitas kesehatan tanpa tenaga profesional tidak menghasilkan manfaat optimal. Sebaliknya, belanja pegawai yang tidak terkait dengan mutu layanan dapat mempersempit ruang investasi. Nurwahiddah dan Setiawati (2025) menunjukkan hubungan dana perimbangan dengan belanja modal, sedangkan Saputra et al. (2025) memperlihatkan bahwa kebijakan pengeluaran dapat membentuk pertumbuhan inklusif melalui jalur perantara.

### **Analisis Jalur dan Mediasi**

Analisis jalur memisahkan pengaruh langsung, tidak langsung, dan total. Dalam penelitian ini, DBH SDA dan DBH Pajak ditempatkan sebagai variabel eksogen. Pertumbuhan ekonomi menjadi mediator, sedangkan kemiskinan menjadi variabel akhir. Mediasi memerlukan bukti bahwa variabel sumber memengaruhi mediator dan mediator memengaruhi variabel akhir. Hayes (2022) menekankan bahwa signifikansi pengaruh tidak langsung sebaiknya diuji dengan bootstrap karena distribusi produk koefisien sering tidak normal.

Mediasi penuh terjadi ketika pengaruh tidak langsung terbukti dan pengaruh langsung melemah hingga tidak signifikan. Mediasi parsial terjadi ketika jalur langsung dan tidak langsung sama-sama terbukti. Mediasi tidak dapat dinyatakan jika jalur awal menuju mediator tidak signifikan atau jika pengaruh tidak langsung tidak diuji. Penelitian ini menafsirkan mediasi secara hati-hati karena lampiran tesis tidak menyediakan hasil bootstrap atau uji Sobel.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori dan karakter *ex post facto*. Seluruh peristiwa fiskal, ekonomi, dan sosial telah terjadi sebelum analisis. Lokasi penelitian ialah Kabupaten Halmahera Selatan. Unit pengamatan berbentuk tahun dari 2016 sampai 2025 sehingga terdapat sepuluh observasi tahunan. Penelitian dilaksanakan pada Januari-Maret 2026 melalui penelusuran dokumen, rekonsiliasi data, pengolahan statistik, dan penyusunan laporan.

Data penelitian merupakan data sekunder. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan bersumber dari BPS Kabupaten Halmahera Selatan. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada laju PDRB atas dasar harga konstan 2010. Kemiskinan mengacu pada persentase penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Data DBH SDA dan DBH Pajak bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan, dan dokumen pertanggungjawaban APBD. Penelitian menggunakan realisasi penerimaan, bukan pagu awal.

Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan. Peneliti mencatat nama variabel, tahun, nilai, satuan, sumber, status data, dan halaman dokumen. Rekonsiliasi dilakukan ketika dua sumber menampilkan angka berbeda. Laporan realisasi yang telah diaudit mendapat prioritas, sedangkan data BPS mengikuti seri terbaru. Pemeriksaan internal mencakup kelengkapan tahun, konsistensi satuan, tanda desimal, dan perubahan nilai yang ekstrem.

Analisis dimulai dengan statistik deskriptif. Uji asumsi mencakup normalitas residual melalui Kolmogorov-Smirnov, autokorelasi melalui Durbin-Watson, dan multikolinearitas melalui tolerance dan VIF. Analisis jalur menggunakan tiga model regresi. Model I menguji pengaruh DBH SDA dan DBH Pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Model II menguji pengaruh langsung kedua jenis DBH terhadap kemiskinan. Model III memasukkan pertumbuhan ekonomi bersama kedua jenis DBH untuk menjelaskan kemiskinan.

Persamaan Model I dirumuskan sebagai  $Z = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1$ . Persamaan Model II dirumuskan sebagai  $Y = \alpha + \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + e_2$ . Persamaan Model III dirumuskan sebagai  $Y = \alpha + \beta_5 X_1 + \beta_6 X_2 + \beta_7 Z + e_3$ .  $X_1$  menunjukkan DBH SDA,  $X_2$  menunjukkan DBH Pajak,  $Z$  menunjukkan pertumbuhan ekonomi, dan  $Y$  menunjukkan tingkat kemiskinan. Keputusan statistik menggunakan taraf signifikansi 5 persen.

Penelitian menilai pengaruh mediasi melalui keterpenuhan jalur dan perubahan pengaruh langsung. Tesis tidak menyajikan bootstrap atau uji Sobel. Oleh sebab itu, artikel tidak menyatakan signifikansi pengaruh tidak langsung hanya berdasarkan perkalian arah koefisien. Kesimpulan menggunakan frasa belum terbukti memediasi ketika jalur pertama tidak signifikan atau ketika selang kepercayaan pengaruh tidak langsung tidak tersedia.

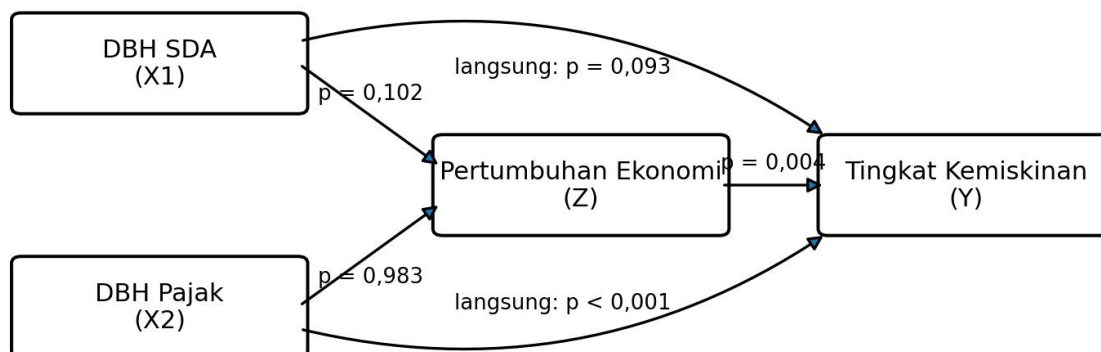
**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

| <b>Variabel</b>             | <b>Definisi operasional</b>                            | <b>Indikator</b>                                     | <b>Satuan</b>      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| DBH SDA ( $X_1$ )           | Realisasi penerimaan bagi hasil dari sumber daya alam. | Realisasi tahunan atau kontribusi sesuai data tesis. | Persen / Rp miliar |
| DBH Pajak ( $X_2$ )         | Realisasi penerimaan bagi hasil pajak pusat.           | Realisasi tahunan atau kontribusi sesuai data tesis. | Persen / Rp miliar |
| Pertumbuhan ekonomi ( $Z$ ) | Perubahan PDRB riil dari tahun sebelumnya.             | Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010.                     | Persen             |

| Variabel               | Definisi operasional                         | Indikator                   | Satuan |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Tingkat kemiskinan (Y) | Proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan. | Persentase penduduk miskin. | Persen |

*Sumber: Bab III tesis Fitriah, diringkas, 2026.*

### Model Analisis Jalur



**Gambar 3. Model Analisis Jalur Penelitian**

*Sumber: Hasil diolah, 2026.*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Variabel Penelitian

Data analisis 2016-2025 menunjukkan variasi yang besar pada kedua jenis DBH. DBH SDA memiliki nilai rendah pada awal periode, kemudian meningkat kuat pada 2020-2025. DBH Pajak bergerak lebih tinggi, tetapi turun tajam pada 2018-2020 sebelum kembali meningkat. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan juga berfluktuasi. Data tersebut menegaskan bahwa hubungan antarkomponen fiskal dan hasil pembangunan tidak dapat disimpulkan hanya melalui kesamaan arah tahunan.

**Tabel 2. Data Analisis Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2025**

| Tahun | DBH SDA | DBH Pajak | Pertumbuhan Ekonomi | Kemiskinan |
|-------|---------|-----------|---------------------|------------|
| 2016  | 5,22    | 83,76     | 5,69                | 10,09      |
| 2017  | 3,58    | 98,42     | 16,60               | 9,06       |
| 2018  | 4,46    | 35,91     | 15,44               | 9,25       |
| 2019  | 6,32    | 33,67     | 12,46               | 4,80       |
| 2020  | 26,77   | 39,37     | 16,22               | 5,03       |
| 2021  | 29,45   | 96,23     | 14,44               | 5,21       |
| 2022  | 31,65   | 96,38     | 16,40               | 13,65      |
| 2023  | 31,47   | 97,89     | 16,79               | 13,69      |

| Tahun | DBH SDA | DBH Pajak | Pertumbuhan Ekonomi | Kemiskinan |
|-------|---------|-----------|---------------------|------------|
| 2024  | 33,72   | 97,12     | 22,94               | 5,68       |
| 2025  | 32,54   | 98,43     | 23,38               | 5,63       |

*Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Selatan, 2026.*

Rata-rata kemiskinan mencapai 8,2080 dengan standar deviasi 1,96084. DBH SDA memiliki rata-rata 20,5170 dan standar deviasi 13,83575. DBH Pajak memiliki rata-rata 77,7170 dan standar deviasi 28,99671. Pertumbuhan ekonomi memiliki rata-rata 16,0350 dengan standar deviasi 5,43004. Penyebaran DBH lebih tinggi daripada kemiskinan dan pertumbuhan. Kondisi ini mencerminkan volatilitas penerimaan transfer yang dapat menyulitkan penyusunan program jangka menengah.

**Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

| Variabel            | Rata-rata | Standar Deviasi | N  |
|---------------------|-----------|-----------------|----|
| Tingkat kemiskinan  | 8,2080    | 1,96084         | 10 |
| DBH SDA             | 20,5170   | 13,83575        | 10 |
| DBH Pajak           | 77,7170   | 28,99671        | 10 |
| Pertumbuhan ekonomi | 16,0350   | 5,43004         | 10 |

*Sumber: Hasil analisis SPSS Statistics 26, 2026.*

#### **Uji Asumsi klasik**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa residual memenuhi asumsi normalitas. Nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,951 mendekati dua dan berada dalam rentang yang digunakan tesis untuk menyatakan tidak terjadi autokorelasi. Seluruh nilai tolerance melebihi 0,10 dan VIF berada antara 1,309 sampai 1,968. Model tidak menunjukkan multikolinearitas yang mengganggu estimasi.

**Tabel 4. Ringkasan Uji Asumsi Klasik**

| Pengujian                     | Indikator                      | Nilai        | Kesimpulan       |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|
| Normalitas                    | Asymp. Sig. Kolmogorov-Smirnov | 0,200        | Residual normal  |
| Autokorelasi                  | Durbin-Watson                  | 1,951        | Tidak terdeteksi |
| Multikolinearitas DBH SDA     | Tolerance; VIF                 | 0,508; 1,968 | Tidak terdeteksi |
| Multikolinearitas DBH Pajak   | Tolerance; VIF                 | 0,764; 1,309 | Tidak terdeteksi |
| Multikolinearitas pertumbuhan | Tolerance; VIF                 | 0,600; 1,667 | Tidak terdeteksi |

*Sumber: Hasil analisis SPSS Statistics 26, 2026.*

Model I menghasilkan R kuadrat 0,400. DBH SDA dan DBH Pajak menjelaskan 40,0 persen variasi pertumbuhan ekonomi, tetapi nilai adjusted R kuadrat turun menjadi 0,229 karena jumlah observasi terbatas. Model II menghasilkan R kuadrat 0,697 dan adjusted R kuadrat 0,610.

Model III menghasilkan R kuadrat 0,932 dan adjusted R kuadrat 0,898. Daya jelaskan yang tinggi pada Model III menunjukkan bahwa kombinasi DBH SDA, DBH Pajak, dan pertumbuhan ekonomi berkaitan kuat dengan variasi kemiskinan dalam sampel. Nilai tersebut tidak menghapus keterbatasan ukuran sampel dan belum membuktikan hubungan kausal yang kuat.

**Tabel 5. Ringkasan Koefisien Determinasi**

| Model | Variabel dependen   | Variabel independen                 | R Square | Adjusted R Square |
|-------|---------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|
| I     | Pertumbuhan ekonomi | DBH SDA dan DBH Pajak               | 0,400    | 0,229             |
| II    | Tingkat kemiskinan  | DBH SDA dan DBH Pajak               | 0,697    | 0,610             |
| III   | Tingkat kemiskinan  | DBH SDA, DBH Pajak, dan pertumbuhan | 0,932    | 0,898             |

*Sumber: Hasil analisis SPSS Statistics 26, 2026.*

### Hasil Pengujian Hipotesis

Uji parsial menghasilkan pola yang berbeda pada tiga model. DBH SDA dan DBH Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada model pengaruh langsung, DBH SDA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan DBH Pajak berpengaruh positif dan signifikan. Ketika pertumbuhan masuk ke model, pengaruh DBH SDA melemah dan tidak signifikan. DBH Pajak tetap positif dan signifikan, sementara pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

**Tabel 6. Hasil Uji Parsial dan Keputusan Hipotesis**

| Hubungan variabel                        | t      | Sig.   | Keputusan              |
|------------------------------------------|--------|--------|------------------------|
| DBH SDA -> Pertumbuhan ekonomi           | 1,878  | 0,102  | Tidak signifikan       |
| DBH Pajak -> Pertumbuhan ekonomi         | 0,022  | 0,983  | Tidak signifikan       |
| DBH SDA -> Kemiskinan, model langsung    | -2,904 | 0,023  | Negatif dan signifikan |
| DBH Pajak -> Kemiskinan, model langsung  | 3,829  | 0,006  | Positif dan signifikan |
| DBH SDA -> Kemiskinan, dengan mediator   | -1,993 | 0,093  | Tidak signifikan       |
| DBH Pajak -> Kemiskinan, dengan mediator | 7,524  | <0,001 | Positif dan signifikan |
| Pertumbuhan ekonomi -> Kemiskinan        | -4,556 | 0,004  | Negatif dan signifikan |

*Sumber: Hasil analisis SPSS Statistics 26, 2026.*

Hasil uji parsial pada tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa DBH SDA dan DBH Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DBH SDA pada model langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan DBH Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Setelah pertumbuhan ekonomi dimasukkan sebagai mediator, pengaruh DBH SDA terhadap kemiskinan menjadi tidak signifikan, sementara DBH Pajak tetap berpengaruh positif dan signifikan. Pertumbuhan ekonomi sendiri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan.

Tabel 7. Evaluasi Jalur Mediasi

| Jalur mediasi                          | Bukti jalur awal               | Bukti mediator ke Y      | Kesimpulan               |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DBH SDA -> Pertumbuhan -> Kemiskinan   | $p = 0,102$ , tidak signifikan | $p = 0,004$ , signifikan | Belum terbukti memediasi |
| DBH Pajak -> Pertumbuhan -> Kemiskinan | $p = 0,983$ , tidak signifikan | $p = 0,004$ , signifikan | Belum terbukti memediasi |

Sumber: Sintesis hasil analisis jalur dalam tesis Fitriah, 2026.

Hasil evaluasi jalur mediasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum terbukti memediasi pengaruh DBH SDA maupun DBH Pajak terhadap kemiskinan. Kondisi tersebut terjadi karena jalur DBH SDA dan DBH Pajak menuju pertumbuhan ekonomi tidak signifikan, meskipun pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Bukti mediasi secara statistik belum terpenuhi sehingga perubahan DBH SDA dan DBH Pajak tidak dapat dinyatakan menurunkan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

### Pengaruh DBH SDA terhadap Pertumbuhan Ekonomi

DBH SDA memperoleh  $t$  sebesar 1,878 dengan signifikansi 0,102. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan bergerak searah dengan pertumbuhan, tetapi bukti statistik belum cukup pada taraf 5 persen. Temuan ini berarti besarnya penerimaan SDA belum menjadi penentu utama aktivitas ekonomi Halmahera Selatan selama periode penelitian. Produksi komoditas, investasi swasta, harga mineral, teknologi, dan kapasitas industri dapat lebih dominan dalam menentukan PDRB.

Teori pertumbuhan endogen mengharapkan penerimaan fiskal mendorong pertumbuhan jika pemerintah mengubahnya menjadi infrastruktur, modal manusia, inovasi, dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mata rantai tersebut belum terlihat kuat. Penerimaan dapat masuk ke program dengan waktu pelaksanaan panjang, proyek dapat mengalami jeda, dan belanja dapat bocor ke pemasok dari luar daerah. Karakter kepulauan juga meningkatkan biaya konstruksi serta logistik. Kondisi ini mengurangi pengganda lokal dari setiap rupiah DBH SDA.

Temuan berbeda dari AlQomariah et al. (2022) yang menemukan keterkaitan DBH dengan pertumbuhan di Boyolali. Perbedaan dapat berasal dari struktur ekonomi dan periode data. Halmahera Selatan mengalami pertumbuhan sangat tinggi yang dipengaruhi pertambangan padat modal. PDRB dapat naik karena ekspansi perusahaan besar tanpa bergantung langsung pada belanja pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan perspektif kutukan sumber daya yang menekankan bahwa penerimaan besar tidak otomatis membentuk diversifikasi dan produktivitas lokal.

### Pengaruh DBH Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

DBH Pajak menghasilkan  $t$  sebesar 0,022 dengan signifikansi 0,983. Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang sangat lemah dan tidak signifikan. Fluktuasi penerimaan juga terlihat lebih besar daripada perubahan pertumbuhan. DBH Pajak dapat naik atau turun akibat kebijakan penerimaan pusat dan mekanisme penyaluran yang tidak selalu bergerak bersama kegiatan produksi lokal pada tahun yang sama.

Teori pengganda fiskal menjelaskan bahwa belanja pemerintah mendorong output ketika dana berputar pada pasar lokal. Pengganda mengecil jika barang, jasa, kontraktor, dan tenaga ahli

berasal dari luar daerah. Kabupaten kepulauan sering memiliki basis pemasok yang sempit. Pengadaan dapat mengalihkan sebagian besar pendapatan ke wilayah lain. Keterlambatan penyaluran dan pelaksanaan juga membuat dampak muncul pada tahun berikutnya, sedangkan model menggunakan hubungan kontemporer.

Liyana et al. (2022) menempatkan kualitas alokasi sebagai penentu manfaat DBH Pajak. Hasil Halmahera Selatan mendukung pandangan tersebut. Pemerintah daerah perlu menghubungkan penerimaan dengan faktor yang dapat meningkatkan produktivitas, seperti konektivitas, energi, air, keterampilan, perizinan, dan dukungan usaha lokal. Evaluasi harus menilai penggunaan aset dan hasil pelayanan, bukan hanya serapan anggaran.

### **Pengaruh Langsung DBH SDA terhadap Kemiskinan**

Pada Model II, DBH SDA menghasilkan t sebesar -2,904 dan signifikansi 0,023. Arah negatif dan signifikan menunjukkan bahwa kenaikan DBH SDA berkaitan dengan penurunan kemiskinan ketika pertumbuhan ekonomi belum dimasukkan. Hasil ini dapat mencerminkan saluran langsung melalui pelayanan dasar, bantuan sosial, infrastruktur desa, air bersih, pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan masyarakat.

Temuan tersebut tidak berarti seluruh DBH SDA selalu efektif. Pengaruh langsung dapat muncul tanpa peningkatan PDRB jika belanja meningkatkan konsumsi, mengurangi biaya rumah tangga, atau memperbaiki akses layanan. Perspektif kapabilitas menjelaskan bahwa rumah tangga dapat memperoleh manfaat melalui kesehatan, pendidikan, mobilitas, dan perlindungan sosial. Manfaat tersebut tidak selalu tercatat sebagai pertumbuhan pada tahun yang sama.

Hijrasil (2024) menunjukkan bahwa transfer SDA memiliki hubungan yang berbeda dengan investasi, pertumbuhan, dan kemiskinan di Maluku Utara. Hasil penelitian memperkuat kebutuhan untuk memisahkan jalur langsung dan jalur pertumbuhan. Pemerintah perlu menjaga program yang terbukti menjangkau kelompok miskin, tetapi juga memperbaiki transparansi sasaran, pemerataan antarwilayah, dan kesinambungan manfaat.

### **Pengaruh Langsung DBH Pajak terhadap Kemiskinan**

DBH Pajak menghasilkan t sebesar 3,829 dengan signifikansi 0,006 pada Model II. Arah positif menunjukkan bahwa kenaikan DBH Pajak berkaitan dengan peningkatan kemiskinan dalam periode pengamatan. Temuan ini tidak boleh ditafsirkan secara sederhana sebagai bukti bahwa transfer pajak menyebabkan kemiskinan. Koefisien dapat mencerminkan respons transfer terhadap kebutuhan fiskal, jeda program, perubahan harga, distribusi manfaat yang tidak merata, atau variabel lain yang tidak masuk ke model.

Maily dan Kartika (2025) menunjukkan bahwa transfer fiskal dapat menghasilkan arah yang tidak sesuai harapan ketika alokasi tidak efisien dan sasaran program lemah. Nuzul (2025) juga menekankan perbedaan dampak transfer menurut wilayah. Pada Halmahera Selatan, DBH Pajak mungkin lebih banyak menopang administrasi atau program umum yang manfaatnya tidak langsung diterima rumah tangga miskin. Pengeluaran yang terkonsentrasi di pusat kabupaten juga dapat membatasi dampak pada pulau kecil dan desa terpencil.

Hasil ini menjadi sinyal evaluasi. Pemerintah perlu menelusuri program yang dibiayai, lokasi penerima, kelompok sasaran, waktu pelaksanaan, dan indikator hasil. Penganggaran berbasis hasil perlu menghubungkan sumber dana dengan perubahan layanan dan kemiskinan. Pemerintah juga perlu memantau inflasi pangan, pengangguran, dan ketimpangan karena faktor tersebut dapat bergerak bersama penerimaan dan kemiskinan.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan**

Pertumbuhan ekonomi menghasilkan t sebesar -4,556 dengan signifikansi 0,004 pada Model

III. Arah negatif dan signifikan menunjukkan bahwa pertumbuhan yang lebih tinggi berkaitan dengan penurunan kemiskinan setelah DBH SDA dan DBH Pajak dikendalikan. Temuan ini mendukung teori pertumbuhan pro-miskin pada tingkat agregat. Peningkatan aktivitas ekonomi dapat memperluas pekerjaan, pendapatan, permintaan usaha, dan kapasitas fiskal.

Hubungan yang signifikan tidak menjamin seluruh pertumbuhan telah inklusif. Data 2020-2024 menunjukkan lonjakan output yang tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan pada tahun yang sama. Struktur sektor, kualitas pekerjaan, upah, harga kebutuhan, dan keterkaitan perusahaan besar dengan ekonomi lokal menentukan besarnya manfaat. Salsabil dan Riani (2023) menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan memengaruhi kemampuan masyarakat memperoleh manfaat pertumbuhan.

Pemerintah daerah perlu memperkuat sektor penyerap tenaga kerja, termasuk perikanan, pertanian, pengolahan, perdagangan, pariwisata, konstruksi lokal, dan jasa. Program pelatihan harus sesuai kebutuhan pasar. Pengadaan pemerintah dapat memperluas partisipasi pemasok lokal tanpa mengurangi prinsip persaingan dan kualitas. Strategi tersebut meningkatkan retensi pendapatan serta membuat pertumbuhan lebih relevan bagi rumah tangga miskin.

### **Peran Mediasi Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi belum terbukti memediasi pengaruh DBH SDA terhadap kemiskinan. Jalur DBH SDA menuju pertumbuhan tidak signifikan dengan  $p = 0,102$ , walaupun pertumbuhan menuju kemiskinan signifikan dengan  $p = 0,004$ . Setelah mediator masuk, pengaruh DBH SDA terhadap kemiskinan melemah menjadi  $p = 0,093$ . Pola ini memberi indikasi pembagian pengaruh, tetapi tidak cukup untuk menyatakan mediasi karena jalur awal tidak signifikan dan selang kepercayaan pengaruh tidak langsung tidak tersedia.

Pertumbuhan ekonomi juga belum terbukti memediasi pengaruh DBH Pajak terhadap kemiskinan. Jalur DBH Pajak menuju pertumbuhan hampir nol dan tidak signifikan dengan  $p = 0,983$ . Pengaruh langsung DBH Pajak terhadap kemiskinan tetap positif dan signifikan setelah mediator dimasukkan. Dengan demikian, pertumbuhan tidak menjelaskan hubungan tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa masalah utama berada pada konversi penerimaan menjadi aktivitas ekonomi yang inklusif.

Hayes (2022) merekomendasikan bootstrap untuk menguji pengaruh tidak langsung. Tesis tidak menyajikan bootstrap atau uji Sobel. Ukuran sampel sepuluh observasi juga membatasi ketepatan estimasi. Artikel menyimpulkan bahwa mediasi belum terbukti, bukan bahwa mediasi pasti tidak ada. Penelitian lanjutan perlu memakai periode lebih panjang, data panel, lag penerimaan, serta variabel belanja modal dan belanja pegawai.

### **Implikasi Kebijakan**

Hasil penelitian menekankan kualitas konversi penerimaan menjadi hasil. Pemerintah tidak cukup meningkatkan besaran transfer atau mengejar serapan. Setiap program perlu memiliki rantai hasil dari input, keluaran, penggunaan layanan, produktivitas, pekerjaan, pendapatan, hingga penurunan kemiskinan. Bappeda, BPKAD, perangkat teknis, dan inspektorat perlu menggunakan indikator yang sama agar evaluasi dapat menelusuri kontribusi setiap sumber dana.

DBH SDA perlu diarahkan pada diversifikasi ekonomi dan aset jangka panjang. Prioritas meliputi konektivitas antarpulau, air bersih, pendidikan vokasi, kesehatan, perikanan, pertanian, pengolahan, energi, dan dukungan UMKM. Pemerintah juga perlu membentuk mekanisme stabilisasi agar program prioritas tetap berjalan ketika penerimaan komoditas menurun. DBH Pajak perlu dievaluasi secara khusus karena koefisiennya positif terhadap kemiskinan. Evaluasi harus memeriksa sasaran, lokasi, komposisi belanja, dan jeda hasil.

Belanja modal dan belanja pegawai harus saling melengkapi. Aset memerlukan tenaga pengelola, biaya operasi, dan pemeliharaan. Aparatur memerlukan sarana, kompetensi, data, dan standar kinerja. Pemerintah perlu menghindari proyek tanpa rencana penggunaan dan belanja pegawai yang tidak terhubung dengan mutu pelayanan. Penguatan pemasok lokal dan tenaga kerja daerah dapat memperbesar pengganda belanja serta mengurangi kebocoran ekonomi.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

DBH SDA dan DBH Pajak belum terbukti memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan selama 2016-2025. Pada model pengaruh langsung, DBH SDA berkaitan negatif dan signifikan dengan kemiskinan, sedangkan DBH Pajak berkaitan positif dan signifikan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan negatif dan signifikan dengan kemiskinan. Ketika mediator masuk, pengaruh DBH SDA melemah dan DBH Pajak tetap positif. Pertumbuhan ekonomi belum terbukti memediasi kedua jenis DBH karena jalur transfer menuju pertumbuhan tidak signifikan dan tesis tidak menyediakan uji bootstrap atau Sobel. Temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan fiskal yang besar belum otomatis membentuk pertumbuhan inklusif dan penurunan kemiskinan.

### **Saran**

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan perlu mengarahkan DBH pada program produktif dan program pengurangan kemiskinan yang memiliki sasaran, lokasi, indikator, dan hasil yang jelas. DBH SDA perlu membiayai diversifikasi ekonomi, konektivitas, modal manusia, dan layanan dasar. Penggunaan DBH Pajak perlu diaudit dari sisi komposisi belanja, pemerataan, dan efektivitas program. Belanja modal dan belanja pegawai harus dirancang sebagai satu sistem pelayanan. Pemerintah juga perlu mengintegrasikan data penerimaan, belanja, PDRB sektoral, pekerjaan, dan kemiskinan agar evaluasi berbasis hasil dapat dilakukan setiap tahun.

Penelitian memiliki keterbatasan berupa sepuluh observasi tahunan, penggunaan hubungan kontemporer, belum masuknya variabel pengendali, serta tidak tersedianya pengujian bootstrap untuk mediasi. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan seri waktu lebih panjang atau panel kabupaten/kota, memasukkan investasi, pengangguran, IPM, inflasi, ketimpangan, belanja modal, dan belanja pegawai, serta menguji jeda kebijakan. Pendekatan tersebut dapat menghasilkan bukti yang lebih kuat mengenai jalur transfer fiskal, pertumbuhan, dan kemiskinan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- AlQomariah, A. N. R., Pardanawati, S. L., & Utami, W. B. (2022). Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2). <https://doi.org/10.53088/jikab.v1i2.9>
- Ayati, N., Siswanto, S., & Khusnudin, K. (2025). The impact of zakat, infak, and sedekah funds, life expectancy, and average length of schooling on poverty mediated by economic growth in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Penghitungan dan analisis kemiskinan makro Indonesia 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan. (2025). Kabupaten Halmahera Selatan dalam angka 2025.
- Bahasoan, A. N., Ikham, A. A., & Soumena, F. Y. (2025). Fiscal decentralization and economic growth: A human capital perspective. *Scientific Culture*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). Portal data transfer ke daerah dan APBD.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Gafur Mas'ud, A., & Rochaida, E. (2022). Determinan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1). <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10393>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hayes, A. F. (2022). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach* (3rd ed.). The Guilford Press.
- Hijrasil. (2024). Pengaruh PAD, DAU, DAK, bagi hasil SDA, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(3), 129-142. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i3.479>
- Hilmiyah, F., & Anggita, A. N. (2025). The effect of fiscal decentralization and economic growth on poverty reduction: A case study of Grobogan Regency. *Jurnal Bappeda Kabupaten Grobogan*.
- Isman, M. H. S., Salomo, R. V., & Bakri, M. R. (2025). Impact of fiscal transfers and local revenue accountability on community welfare in Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*.
- Junaidi, J. (2024). Islamic banks' contribution to Indonesia districts' economic growth and poverty alleviation. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 29(58).
- Liyana, N. F., Ratnasari, G. A. I., & Susanto, E. (2022). Pajak, dana bagi hasil pajak dan pembangunan daerah di Indonesia. *Balance Vocation Accounting Journal*.
- Maily, F. D., & Kartika, M. (2025). Poverty analysis in Indonesia's ten poorest provinces: Socioeconomic and fiscal determinants. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*.
- Nany, M., Pratama, D. B., Prasetyaningrum, M., & Kusumaningsih, A. U. (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 22(3).
- Nurwahiddah, A., & Setiawati, E. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal. *Indonesian Journal of Digital Business*.
- Nuzul, T. H. N. (2025). Pengaruh transfer fiskal terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*.
- Ramadhani, D. R. N., & Prasetyo, A. (2024). The influence of fiscal policy on poverty in Indonesia 1998-2022 using the ARDL method. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022a). *Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*.
- Republik Indonesia. (2022b). *Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Republik Indonesia. (2022c). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah*.
- Salsabil, I., & Riani, W. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 15-24. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1886>

- 
- Saputra, M. E., Zulham, T., & Srinita, S. (2025). The effect of Aceh government spending policy on inclusive growth: Income per capita as a mediating variable. *Grimsa Journal of Business and Economics Studies*.
- Sari, Y. P. (2025). Dapatkah dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia? *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*.
- Silalahi, P., & Primacintya, V. A. (2025). The role of investment in promoting inclusive growth: A panel data study of Indonesian provinces. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.
- Tope, P., Kasim, M. Y., & Ichwan, M. (2025). Impact of Gini ratio, economic growth and unemployment on poverty levels: A panel data analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues*.
- United Nations Development Programme. (2024). *Human Development Report 2023/2024: Breaking the gridlock - Reimagining cooperation in a polarized world*.
- World Bank. (2024). *Poverty, prosperity, and planet: Pathways out of the polycrisis*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2123-3>
- Zahirah, Y. N., & Dewi, D. D. (2025). The effect of fiscal independence ratio, transfer funds and regional expenditure on poverty in Central Java Province 2020-2024. *Journal of Tourism Economics and Policy*.